

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desakan dari para *stakeholder* akan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (GG) merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh para *stakeholder*. Desakan tersebut tidak terbatas pada organisasi privat, tetapi juga pada organisasi publik termasuk Organisasi keagamaan sebagai salah satu organisasi nirlaba sehingga membutuhkan kajian lebih khusus tentang akuntabilitas, transparansi dan efektivitas yang merupakan prinsip dari GG. Pura Kahyangan Tiga berdasarkan fungsinya adalah sebagai tempat suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi dan para Dewa (Pandu dkk, 2016). Pura kahyangan tiga yang ada di desa pakraman termasuk dalam organisasi nirlaba, dimana pelaporan keuangan terhadap aktivitas keagamaan dan sosial yang dilakukan harus dilaporkan (Agustana dkk, 2017). Pentingnya pembuatan laporan keuangan di pura sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa pakraman itu sendiri sehingga persepsi negatif terkait dengan pengelolaan keuangan pura dapat dihindari. Selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif pura tersebut dalam menggunakan dana.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting bagi entitas publik agar dapat memaksimalkan peranannya dan untuk bertahan sebagai pengendali dalam sebuah organisasi. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*) ,Selain itu Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi (UNDP, 1997). Sedangkan Efektivitas merupakan upaya untuk mengevaluasi jalannya organisasi. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau program dalam suatu organisasi. Disebut efektif apabila tujuan yang telah ditentukan telah tercapai dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar sesuai dengan

kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya (UNDP, 1997). Untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan efektivitas dalam suatu organisasi tentunya didasari dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Organisasi publik non pemerintahan dan organisasi nirlaba bidang keagamaan tidak luput dari tuntutan untuk melaporkan keuangan (Wati dkk, 2017). Pelaporan atas penggunaan dana yang dilakukan pada organisasi nirlaba seperti pura merupakan hal yang penting karena merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi tersebut yang sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan pura, prinsip Tri Hita Karana tercermin dalam cara masyarakat Hindu dalam menggunakan dan mengalokasikan dana untuk kepentingan pura dan masyarakat secara adil, seimbang, dan harmonis. Misalnya, dana yang dikumpulkan dari masyarakat biasanya digunakan untuk membiayai upacara keagamaan, pemeliharaan pura, serta proyek sosial dan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hubungan antara pengelolaan yang transparan, akuntabel dan efektif dana Pura Kahyangan Tiga dengan konsep Tri Hita Karana ini akan menciptakan hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan sesama manusia dan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Konsep ini menggambarkan keseimbangan tiga aspek dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Jika penerapan pengelolaan dana pura ini tidak baik, maka ketidakharmonisan antara Tuhan Yang Maha Esa, sesama umat, dan lingkungan akan terjadi. Kegiatan manipulasi sama halnya dengan membohongi tuhan, umat manusia dan lingkungan sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran dari Tri Hita Karana.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama untuk memastikan bahwa keuangan Pura dikelola secara efektif dan transparan serta akuntabel. Selain itu juga harus sesuai dengan pedoman yang berlaku yakni ISAK 335. Pengelolaan keuangan Pura melibatkan beberapa tahapan yang penting, tahapan pertama yaitu perencanaan, tahap ini melibatkan menetapkan

tujuan keuangan pura, menemukan sumber pendapatan, dan mengestimasi anggaran yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Setelah perencanaan selesai, pengelola keuangan pura harus membuat anggaran. Anggaran ini harus mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran, serta bagaimana dana akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program. Setelah anggaran disetujui, pura dapat melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengalokasikan dana sesuai dengan rencana, membeli barang atau jasa yang diperlukan, dan melakukan kegiatan seperti upacara keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kebudayaan lainnya. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pura secara sistematis dan teratur termasuk pencatatan dan dokumentasi dana yang diterima dan digunakan, pembukuan keuangan, dan hal-hal lainnya. Penatausahaan yang baik memastikan pengelolaan keuangan pura transparan dan akuntabel. Pura harus menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti bulanan atau tahunan, yang menunjukkan kinerja keuangan dan pencapaian tujuan pura. Laporan ini dapat digunakan untuk mengawasi kesehatan keuangan pura dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangannya. Langkah terakhir dalam pengelolaan keuangan pura adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan sumber daya yang mereka terima dari para donatur, anggota masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pura dapat mengelola keuangannya dengan baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Berdasarkan hasil dari penelitian Wijaya, I.G.S. (2019) Pengelolaan keuangan pada Pura Kahyangan Tiga, Desa Pakraman Patoman masih terbilang cukup sederhana. Hal ini dibuktikan dengan pembukuannya hanya sekedar pencatatan kas masuk dan keluar. Dari hasil diatas menunjukan bahwa pengelolaan keuangan masih kurang baik. Dalam penelitian tersebut belum meneliti efektivitas pengelolaan keuangan pura dimana efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan, hal ini sejalan dengan pemikiran Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa keterbatasan antara lain keterbatasan waktu dan informan dalam melakukan wawancara, terdapat kecenderungan bias dalam proses wawancara.

Dalam penelitian ini akan lebih memperdalam penggalian informasi dan menambahkan fokus penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana”** (Studi Kasus Pada Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana?
3. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan Menganalisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.
2. Menjelaskan dan Menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.

3. Menjelaskan dan Menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan dan memahami terkait dengan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Pada Pura Kahyangan Tiga, Desa Pakraman Patoman.

2. Manfaat Bagi Pengelola Keuangan Pura Kahyangan Tiga, Desa Pakraman Patoman.:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pengelola Keuangan Pura Kahyangan Tiga, Desa Pakraman Patoman berdasarkan hasil penelitian ini.

3. Manfaat Bagi Pihak Akademik:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait Transparansi, akuntabilitas, dan Efektivitas Laporan Keuangan Pura Kahyangan Tiga. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan informasi terkait Transparansi, Akuntabilitas, Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pura Kahyangan Tiga Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.